

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diserangnya simbol liberalisme dan kapitalisme barat ditandai dengan kehancuran *World Trade Center* sebagai akibat dari serangan teroris, peta politik hubungan internasional berubah drastis.¹ Pemegang pucuk pimpinan di Washington menjadikan agenda memerangi terorisme sebagai prioritas utama yang harus dituntaskan, Presiden Bush sebagai pemegang otoritas tertinggi AS memberi perintah untuk memburu terorisme sampai ke sarangnya.² Sejak saat itulah perang terhadap terorisme dimulai. Pengakuan oleh pelaku peristiwa 9/11 yang berasal dari wilayah Afghanistan mulai memicu Amerika Serikat untuk melakukan penyerangan ke wilayah tersebut.

Setelah perburuan terorisme di Afganistan dianggap usai, Washington mulai melihat Irak, dikarenakan anggapan para petinggi AS bahwa Irak merupakan tempat yang paling aman bagi persembunyian terorisme. Pemerintahan Saddam dianggap oleh AS melindungi dan memberikan akses kemudahan terutama dalam melawan AS. Disini AS menganggap Irak sebagai

¹ Pembajakan pesawat yang menghantam *World Trade Center* di New York dan Pentagon, di sisi luar Washington. Pesawat keempat jatuh di daerah Pennsylvania. Perdagangan di Wall Street terhenti. Administrasi Penerbangan Federal menghentikan semua operasi penerbangan di bandara nasional untuk pertama kalinya di sejarah AS. Militer AS diperintahkan untuk siaga penuh. Presiden Bush mengumumkan kepada Negara-negara di dunia dan berjanji untuk "Find those responsible and bring them to justice." Ratusan pemadam kebakaran Kota New York dan polisi yang dikirim untuk menyelamatkan pekerja-pekerja di WTC hilang ketika Gedung Kembar WTC runtuh. Reaksi dari pemimpin-pemimpin internasional sangat cepat sebagai pemimpin dunia merespon dengan geram atas serangan yang terjadi. Disadur dari <<http://www.september11news.com/DailyTimeline.htm>>, (diakses pada tanggal 4 April 2008, pada pukul 16:00 WIB).

² Kutipan Pidato Presiden Bush pada sore hari tanggal 11 September 2001, Pencarian sedang dilakukan terhadap pihak dibalik perbuatan jahat ini. Saya telah memerintahkan seluruh kekuatan intelegen kita dan kelompok penegak hukum untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan membawa mereka ke keadilan. Kita tidak akan membedakan antara teroris yang mengaku melakukan perbuatan ini dan mereka yang menampungnya. Kami sangat menghargai anggota Kongres yang telah bergabung secara keras mengutuk serangan ini. Dan mewakili warga Amerika, Saya berterima kasih kepada banyak pemimpin dunia yang telah ikut berkabung dan menawarkan bantuan. Amerika dan teman-teman kita dan sekutu bergabung dengan semua pihak lainnya yang menginginkan damai dan keamanan di dunia dan mari kita bersama-sama memenangkan perang terhadap terorisme ini. Disadur dari <<http://www.september11news.com/PresidentBush.htm>>. (diakses pada tanggal tanggal 4 April 2008, pada pukul 17:00 WIB).

salah satu negara yang di kategorikan oleh Presiden Bush sebagai *Axis of Evil*³ (poros setan). Selain itu Washington yang menuduh Baghdad memiliki senjata nuklir, berusaha mengubah pemikiran masyarakat dunia akan bahayanya persenjataan nuklir yang dimiliki Irak. Untuk itu perlunya satu persamaan pendapat dan kesatuan untuk bersama-sama mengurangi ancaman dari pemerintahan Saddam dengan menggusur rezim status quo dari kekuasaannya. Dalam rangka menjaga stabilitas dunia, Amerika Serikat mulai menempatkan kehadiran militernya ke Baghdad, dengan melakukan agresi militer untuk menumbangkan apa yang disebut Pemerintahan Bush sebagai *Axis of Evil*.

AS berhasil menggusur pemerintahan Saddam Hussein di wilayah Irak. Namun kondisi wilayah Irak yang terdiri dari banyak kelompok yang terus menerus berperang satu sama lain, membuat AS kesulitan dalam membangun kondisi yang stabil di wilayah tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

AS sebagai negara yang paling besar pengaruhnya di dunia internasional telah mengumumkan perang terhadap terorisme sebagai agenda utamanya setelah terjadinya serangan 9 September 2001 terhadap menara WTC. Wilayah Timur Tengah sering kali digambarkan sebagai wilayah yang menjadi tempat persembunyian bagi kelompok Al-Qaeda⁴ dan teroris lainnya. Adanya pemerintahan Saddam Hussein di Irak dan proses nasionalisasi minyak Irak terhadap perusahaan-perusahaan minyak / kontraktor dari AS dan Inggris membuat AS ingin kembali hadir di Irak, disamping untuk membebaskan rakyat Irak dari pemerintahan diktator Saddam dan mengamankannya dari sarang/ tempat persembunyian para teroris, kedatangan AS juga dalam rangka membuka akses minyak yang tercatat cukup banyak di Irak maupun Timur Tengah.

³ Pidato Bush tahun 2002 di depan *State of Union* dirancang untuk mengubah debat politik dari mengenai perang terhadap Al-Qaeda kepada kemungkinan melakukan konfrontasi dengan negara Irak, Presiden menyebutkan Korea Utara, Irak dan Iran dan mengatakan bahwa Negara-negara seperti ini, dan sekutu terorisnya, membentuk *Axis of Evil* (Poros Setan), membahayakan perdamaian dunia. Dengan mengembangkan Senjata Pemusnah Massal, regime ini berpotensi kematian dan bertumbuh menjadi negara yang berbahaya... Dalam kasus seperti ini, jika dibiarkan bisa menyebabkan bencana besar. Disadur dari <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/09>>. (Diakses pada tanggal 5 April 2008, pada pukul 09:00 WIB).

⁴ AS menuduh Al-Qaeda sebagai dalang pelaku kasus serangan WTC 9/11 tersebut.

Dalam melangkah kaki ke Wilayah Timur Tengah khususnya Irak⁵, tidak tanggung-tanggung AS menggunakan kekuatannya dengan berdasarkan pada Doktrin *Preemptive*.⁶ Melalui doktrin tersebut, AS memberikan legalitas terhadap dirinya sendiri untuk dapat bertindak mendahului, khususnya tindakan militer secara sepihak untuk mencegah adanya kemungkinan ancaman teror terhadap kepentingan AS di mana saja

Kehadiran pasukan militer AS di wilayah Irak banyak menimbulkan polemik, meskipun rezim Saddam Hussein yang dahulu berkuasa dan mengendalikan Irak di bawah kekuasaannya telah dihancurkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor: AS ingin menciptakan stabilitas di Irak dengan membangun Irak yang dapat memerintah sendiri mempertahankan kondisi yang stabil dan melindungi dirinya sendiri, selain itu AS ingin mengamankan Irak dari pengaruh Iran serta kelompok teroris Al-Qaeda yang dapat membawa Irak untuk menolak AS di wilayahnya. Keberadaan minyak di Irak juga menjadi suatu faktor kepentingan AS, terutama dalam mengatasi kebijakan nasionalisasi pengolahan minyak oleh rezim Saddam yang menutup akses perusahaan minyak AS maupun Inggris ke Irak. Keamanan regional di kawasan Timur Tengah juga menjadi perhatian AS dalam pengamanan serta pencegahan terhadap adanya usaha-usaha dominasi dari negara-negara disekitarnya, terlebih isu kepemilikan nuklir serta misil Iran yang dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal.

Hal tersebut menghasilkan pertanyaan penelitian: **Apa yang menyebabkan AS mempertahankan kehadiran militernya di Irak Pasca Saddam Hussein (2003 – 2006)?**

⁵ Kehadiran AS di Wilayah Timur Tengah, khususnya Irak berangkat dari kecurigaan AS atas kepemilikan dan pengembangan senjata pemusnah massal dan kondisi Irak saat itu yang masih dipimpin oleh Saddam Hussein bersikap sebagai penampung teroris yang melarikan diri dari daerah sekitar seperti Afghanistan maupun Al-Qaeda. Sehingga AS mengatakan bahwa Irak merupakan sebuah ancaman.

⁶ Doktrin *Preemptive* merupakan kebijakan pertahanan AS setelah terjadinya peristiwa 9/11, memiliki elemen seperti adanya ancaman yang dianggap berbahaya, perlunya suatu tindakan inisiatif untuk menyadari adanya ancaman, adanya alternatif dalam menggunakan kekuatan untuk meredakan, dan sesuai dengan Piagam PBB ataupun hukum internasional terkait; sehingga AS bisa melakukan tindakan yang dianggap perlu, bahkan mengerahkan militernya untuk menginvasi Negara yang boleh dikatakan belum terbukti melakukan tindakan, dan tanpa adanya asas praduga tak bersalah. Disadur dari Abraham Sofaer, *European Journal of International Law Vol.14*, p.220, April 2003

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa kehadiran pasukan militer AS di negara Irak, dalam periode 2003 - 2006.
2. Menganalisa pentingnya Irak bagi AS terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan rezim baru di Irak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi dalam melihat konteks situasi di negara Irak saat ini, pasca penempatan pasukan militer AS.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada kasus kehadiran pasukan AS di Irak.

1.5 Tinjauan Pustaka

Michael R. Gordon dan General Bernard E. Trainer⁷ menulis perjalanan invasi AS ke Irak dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta setelah berlangsungnya invasi dalam bukunya yang berjudul *The Cobra II: The Inside Story of The Invasion and Occupation of Iraq*. Menurut buku tersebut, invasi AS terhadap Irak dipandang sebagai peperangan yang tidak dimenangkan oleh AS.

Salah satu penyebab kegagalan invasi terlihat dari bagaimana AS tidak mempersiapkan kondisi dan situasi di Irak pasca invasi. Situasi Irak yang bergejolak dengan timbulnya peperangan oleh kelompok insurgensi tidak diprediksi akan terjadi oleh AS sebelumnya, hal ini menyebabkan AS mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan keadaan di Irak.⁸ Sifat perang yang nonkonvensional dan timbul dalam waktu yang terus menerus terjadi menimbulkan teror dan ketakutan bagi AS yang terlihat tidak bisa melakukan tindakan pengamanan terhadap Irak, sekalipun kekuatan AS yang terlihat sangat kuat.

⁷ Michael R. Gordon and General Bernard E. Tainer, *The Cobra II: The Inside Story of The Invasion and Occupation of Iraq*, 2006

⁸ Makmur Keliat, *Transisi Amerika Serikat Menuju Multilateralisme Offensif*, 2006, handnote materi diskusi mata kuliah Dinamika Politik Internasional.

Terlihat bahwa kehadiran AS di Irak belum menciptakan situasi yang aman, sekalipun telah menaruh jumlah pasukan yang cukup banyak, mereka masih belum bisa meredakan kekerasan serta korban yang timbul akibat adanya pemberontakan tersebut. Bagi rakyat Irak, keberadaan AS justru dinilai sebagai penyebab kekacauan daripada sebagai kekuatan yang memerdekakan rakyat Irak dari pemerintahan Saddam yang diktator.

Perjalanan invasi AS ke Irak memang melalui perdebatan baik itu dalam hal jumlah pasukan yang diperlukan untuk melakukan invasi maupun dalam hal strategi yang diterapkan dalam melakukan penyerangan terhadap Irak. Kemungkinan bahwa peperangan akan memakan waktu yang berkepanjangan sudah ada, dan perencanaan yang belum matang pun sempat ditangkap oleh negara Inggris sebagai pasukan koalisi AS dalam melakukan invasi ke Irak.

Keikutsertaan Inggris didasarkan oleh rasa kepercayaannya terhadap kemampuan dan kekuatan AS serta pengalamannya dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia. Negara AS juga menerima banyak pertentangan mengenai kondisi pasca invasi di Irak yang dapat menjadi berat bagi AS dengan mengharuskannya pengiriman pasukan di Irak untuk mengamankan wilayah Irak. Disamping itu peringatan akan bagaimana dalam menegakkan peraturan dan kebijakan keamanan baru pasca invasi di Irak setelah rezim Saddam berlalu tentu akan menjadi hal yang tidak bisa dihindari setelah terjadi kekosongan pemerintahan.

Bagaimanapun proses invasi tetap dijalankan hingga pada saat setelah proses invasi berhasil menumbangkan kekuasaan Saddam, wilayah Irak masih belum sepenuhnya aman. Hancurnya infrastruktur pun banyak dialami oleh seluruh wilayah, terutama yang terjadi akibat perang. Hal ini juga menjadi tugas AS sebagai pihak yang bertindak sebagai penegak keamanan di Irak setelah rezim Saddam selesai ditumbangkan. Jika kita lihat, AS terkesan sulit dan lama dalam mengatasi hal-hal yang terjadi pasca invasi. Hal ini disebabkan karena tidak dipikirkannya cara mengatasi kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan AS pasca invasi.

Saat ini AS memang menghadapi situasi dimana terjadi banyak kekacauan, pemberontakan yang mana sebelumnya tidak dipikirkan bagaimana cara penyelesaiannya. Namun menurut buku ini menyarankan bahwa AS tidak memerlukan keberadaan pasukannya pasca invasi karena Pasukan keamanan Irak yang akan menggantikan peran AS sebagai penjaga keamanan di wilayah Irak. Penarikan mundur pasukan AS akan dapat direalisasikan ketika Pemerintahan Irak beserta kekuatan pengamanannya sudah siap dalam mengamankan Irak. Sebelum melangkah kesana, AS terlebih dahulu harus mempersiapkan kemampuan keamanan Irak dalam mengatasi ancaman yang terjadi.

*The Iraq Study Group Reports*⁹ mengulas tentang situasi saat ini di Irak, baik itu dari segi Security, dijelaskan bahwa banyak kekerasan dan pemberontakan yang timbul karena adanya perang antarkelompok yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kelompok Al Qaeda yang masuk ke Irak. Di sisi lain dalam security, *Iraq Study Group* mengatakan juga bahwa ada kelompok Pasukan militer AS, koalisi dan pemerintahan Irak yang terus menerus melawan adanya serangan dari kelompok lain diatas yang tidak kunjung henti, hingga nyaris bisa dibilang tidak akan berakhir.

Iraq Study Group juga melihat dari segi Politik, di segi ini, kita bisa melihat sudut pandang dari setiap kelompok yang ada di Irak, terbagi atas Shia, Sunni dan Kurdi dengan pemimpin-pemimpinnya sebagai figur yang diyakini oleh kelompok tersebut. *Iraq Study Group* ingin mengusulkan adanya *national reconciliation* dan pemerintah yang dapat secara efektif membawa Irak. Dikatakan bahwa pemerintah Irak memiliki lima kekurangan. Pertama, pemerintah Irak sering menyediakan *service* berdasarkan kelompok tertentu saja. Kedua, kurangnya security dan keamanan terhadap infrastruktur utama seperti tower listrik umum yang sering diserang menggunakan bom dan *sniper* yang menghalangi langkah perbaikan tower tersebut. Ketiga, tingkat korupsi yang tinggi dalam pemerintahan Irak. Keempat, kapasitas pemerintahan yang tidak mencukupi, banyak menteri maupun ahli politik Irak yang pergi meninggalkan Irak maupun melakukan korupsi. Kelima, tingkat yurisdiksi yang masih lemah,

⁹ James A. Baker, III, and Lee H. Hamilton, Co-Chairs, *The Iraq Study Group Report The Way Forward – A New Approach*, New York: Vintage Books, 2006

karena banyaknya ancaman terhadap keluarga, teman dari hakim maupun pejabat hukum yang telah dipilih, sehingga tingkat keadilan menjadi lemah.

Segi selanjutnya yang dilihat yakni segi Ekonomi, *Iraq Study Group* melihat dari segi perkembangan ekonomi, penambangan minyak, politik perminyakan dan rekonstruksi yang dipimpin oleh AS. Dari segi dukungan internasional juga dapat kita lihat dukungan dari negara tetangga meliputi Iran, Syria, Saudi Arabia, Turki, Jordan, Mesir dan dari komunitas internasional yang sebenarnya menginginkan kondisi wilayah Irak yang damai.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penilaian *Iraq Study Group* mengenai kondisi Irak saat ini adalah bahwa AS telah melakukan banyak pengorbanan baik dari segi biaya maupun supportnya dalam bidang militer. Walaupun dengan usaha yang besar, stabilitas di Irak juga belum terwujud, dan situasinya semakin memburuk. Pemerintahan Irak masih belum bisa dalam memimpin, mempertahankan serta melindungi dirinya sendiri tanpa *support* dari AS. Rakyat Irak belum diyakini bahwa mereka sudah bisa bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Negara-negara tetangga dan komunitas internasional belum ditawarkan untuk memainkan peran aktif dan konstruktif dalam mensupport Irak. Kemampuan AS untuk membentuk situasi yang stabil di Irak makin berkurang, dan kekacauan di Irak semakin tidak dapat dikendalikan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh *Iraq Study Group* sejalan dengan yang ingin dicapai oleh pemerintahan AS yakni Irak yang dapat memerintah sendiri, mempertahankan kondisi yang stabil dan melindungi dirinya sendiri. Dimana Irak memiliki perwakilan pemerintahan yang luas di seluruh wilayahnya yang menjaga kesatuan wilayah Irak, damai dengan negara-negara tetangga, menolak terorisme, dan tidak menyerang secara brutal kepada warganya sendiri walau itu dari kelompok yang berbeda di Irak.

Untuk mencapai sasaran tersebut, *Iraq Study Group* menyarankan perubahan dari kedua sisi baik *external* maupun *internal* didalam Irak, dan perlunya membangun dukungan dari segi regional maupun internasional untuk stabilitas di Irak, karena hal tersebut bisa mendorong rakyat Irak untuk menentukan nasibnya sendiri, ke arah yang lebih baik. Dari *external*, AS harus mulai mengerahkan semua elemen kekuatan AS untuk membangun mekanisme

regional yang dapat mendukung proses pembangunan di Irak. Secara *internal*, pemerintah Irak harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai *national reconsiliation*, mengurangi kekerasan, dan meningkatkan kebutuhan sehari-hari dari rakyat Irak mulai dari sekarang dan didukung oleh negara dan masyarakat internasional. Bila keadaan transisi sudah mulai stabil, maka pengurangan kehadiran AS di Irak dapat mulai dijalankan secara bertahap.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan atas Doktrin Carter oleh *United States History*:

*“adopting Brzezinski's formula that the Middle East and South Asia constituted an arc of crisis susceptible to Soviet adventurism. In his State of the Union address of January 1980 he enunciated the Carter Doctrine, declaring that any attempt by an outside force to gain control of the Persian Gulf would be viewed as an attack on the vital interests of the United States”*¹⁰

Berdasarkan konsep formula dari *Brzezinski's*, Doktrin Carter memberi amunisi bagi Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya di wilayah Timur Tengah. Doktrin ini juga memberi banyak celah untuk selalu dijadikan alasan AS untuk menggunakan kekuatan *preemptivenya*. Dalam point yang tertera dalam doktrin tersebut menyatakan juga bahwa tidak boleh ada kekuatan dominan selain Amerika di Timur Tengah. Usaha apapun dari kekuatan diluar Amerika Serikat untuk menguasai Timur Tengah akan dilihat sebagai sebuah serangan terhadap kepentingan vital Amerika Serikat.¹¹

President James Earl Carter juga mengingatkan dalam pidatonya bulan Januari 1980 *State of Union* bahwa:

“any attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf” would constitute a threat to vital U.S. interests, especially oil, and would be met by military action.

¹⁰ James Earl Carter, “Carter Doctrine, 20 Januari 1980 (United States History)”, *Britannica Encyclopedia*, 2008, <<http://www.britannica.com/eb/topic-97287/Carter-Doctrine>>, (diakses pada tanggal 06 April 2008, jam 15:00)

¹¹ *Ibid*

Dalam kata lain, segala usaha oleh pihak/ kekuatan di luar AS untuk menguasai Timur Tengah dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan vital AS, terutama kekayaan sumber daya minyak, dan akan dihadapkan perlawanan dengan aksi militer. Selanjutnya, Carter telah membentuk *Rapid Deployment Force*¹² untuk menjamin keamanan, meningkatkan pengeluaran militer. Pada tahun 1990, Presiden George W. Bush menggunakan doktrin ini dalam mengirimkan militer AS untuk melawan Irak dalam perang teluk pada saat itu. Tidak terkecuali pada tahun 2003, pengerahan militer AS ke Irak karena Saddam Husein masih berkuasa dan merupakan ancaman bagi AS.

Amerika Serikat banyak belajar dari pengalamannya dalam melakukan invasi ke wilayah Afghanistan. Tujuan penempatan militer AS di Irak adalah untuk menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Hal pertama yang dilakukan AS terhadap wilayah tersebut adalah menumbangkan kekuasaan dominasi Saddam Hussein. Dalam hal ini, Saddam memang sudah menjadi incaran AS sejak melakukan invasi ke Kuwait. Keberadaan Saddam di Irak merupakan ancaman bagi AS secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terkait erat dengan keberadaan ladang minyak AS di kawasan tersebut, sesuai dengan Doktrin Carter.

Irak membutuhkan proteksi dan stabilitas di kawasannya. Kondisi Irak sebelumnya dikuasai oleh Saddam Hussein, seorang diktator yang banyak menindas rakyatnya yang tidak patuh dan menentang pemerintahannya. Kehadiran militer AS di Irak adalah untuk misi menjaga perdamaian di wilayah tersebut (*peacekeeping*). Berdasarkan teori Alex Morrison tentang *Peacekeeping*:

*“Actions designed to enhance international peace, security and stability which are authorised by competent national and international organisations and which are undertaken co-operatively and individually by military, humanitarian, good governance, civilian police and other interested agencies and groups.”*¹³

¹² RDF dibentuk pertama kali pada tanggal 1 Oktober 1979, yang beroperasi untuk merespon terhadap krisis yang terjadi di daerah Iran, dan Teluk Persia, Caribbean; menyediakan bantuan militer dan membantu situasi darurat di Teluk Persia. Disadur dari *Instruments of Statecraft: U.S. Guerilla Warfare, Counterinsurgency, and Counterterrorism, 1940-1990*, <<http://www.statecraft.org/chapter13.html>>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2008, jam 15:00)

¹³ Alex Morrison, “The Changing Face of Peacekeeping”, standard presentation at *Pearson Peacekeeping Centre*, (September 2000)

Penyederhanaan dari teori yang dicetuskan oleh Alex Morrison yakni merupakan tindakan yang dirancang untuk meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional, yang dilakukan oleh negara yang kompeten dan organisasi internasional dan dijalankan bersama-sama maupun individual oleh militer, organisasi kemanusiaan, pemerintah yang baik, polisi rakyat dan agen maupun grup lain yang tertarik.¹⁴ Hal inilah yang menjadi dasar AS untuk menempatkan militernya di Irak sebagai negara yang kompeten untuk meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Karena Irak pada masa pemerintahan Saddam dianggap membahayakan perdamaian dunia.

PBB juga merumuskan pemikiran tentang *Peacekeeping*, yaitu:

*"Peacekeeping is a way to help countries torn by conflict create conditions for sustainable peace."*¹⁵

Selanjutnya, dijelaskan bahwa pelaku dari *Peacekeeping* bisa berupa pasukan dan petugas militer, polisi dan rakyat biasa dari banyak negara. Tugas dari *peacekeepers* adalah memonitor dan mengawasi proses perdamaian yang menyatu di dalam situasi post-konflik dan membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menerapkan kebijakan perdamaian yang telah mereka setuju. Bantuan tersebut dapat datang dalam berbagai bentuk seperti *promoting human security, confidence-building measures*, persetujuan pembagian kekuasaan, dukungan proses pemilihan pemimpin, menegakkan peranan hukum, dan perkembangan ekonomi dan sosial.

Dalam menjalankan kebijakan dalam penempatan militer Amerika Serikat di wilayah Irak disebabkan bahwa wilayah Irak dianggap merupakan ancaman bagi AS baik yang berasal dari dalam Irak maupun luar Irak, melihat teori tentang *Balance of Power*. Istilah *Balance of Power* menunjuk pada konsep umum dari kekuatan satu atau lebih negara yang digunakan untuk menjaga keseimbangan dengan satu atau sekelompok negara lainnya.¹⁶ Melihat dari konsep yang

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ UN Peacekeeping – FAQ – Meeting New Challenges, *What is Peacekeeping?*, (Diakses pada tanggal 21 Mei 2008 pada pukul 19:00 WIB)

¹⁶ Joshua S. Goldstein, *International Relations*, Singapore: Pearson Education, 2003., Hal.92

diberikan oleh Edward V. Gullick tentang *Balance of Power*, adalah sebagai berikut:

*"Balance of power can refer to the process by which counterbalancing coalitions have repeatedly formed in history to prevent one state from conquering an entire region"*¹⁷

Dengan kata lain, proses *balance of power* terjadi untuk mencegah usaha dominasi/ penguasaan suatu negara terhadap suatu kawasan/ negara lainnya yang menjadikan situasi menjadi tidak seimbang, bentuk dari kekuatan pencegah berupa koalisi/ gabungan beberapa negara untuk menjaga stabilitas sistem internasional.¹⁸

Menurut Waltz, mengatakan tentang *Balance of Power*:

*"(smaller, weaker) states will balance the power or preponderance of more powerful ones to ensure that the latter do not become too powerful and dominate all other. A bipolar structure, as given in the Cold War, seems to be the best, i.e. the most peaceful one."*¹⁹

Adanya kekuatan pembanding dari negara lain akan menghasilkan suatu perdamaian, dimana negara yang lemah akan dapat dikendalikan serta merasakan adanya anarki atas kemampuan negara lain akan membuat situasi seimbang. Dalam kasus kehadiran militer AS di negara Irak, keberadaan negara AS akan menjadi kekuatan pembanding bagi negara-negara yang memiliki kecenderungan untuk menguasai wilayah Timur Tengah.²⁰

Berdasarkan teori tentang *Balance of Power* dari Mearsheimer:

*"states do not simply balance, but because they want to survive in an anarchical system they get frequently aggressive."*²¹

Mearsheimer menjelaskan bahwa suatu hubungan negara-negara tidak selalu dalam kondisi yang damai dan seimbang. Namun karena suatu negara ingin

¹⁷ Edward V. Gullick, *Europe's Classical Balance of Power*, Cornell, 1955, Niou, Emerson M.S., Peter C. OrdeShook, and Gregory F. Rose

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, New York: Random House, 1979, chapter 1

²⁰ *Ibid*

²¹ J. J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: W. W. Norton, 2001

bertahan dalam sistem yang anarki terhadap kemampuan negara lainnya, maka negara tersebut dapat bersifat sangat agresif.

Istilah ini telah dapat melahirkan konsep baru, yaitu *Balance of Power versi Amerika Serikat*, yakni: Dimana AS melakukan penempatan militernya di Irak untuk mengamankan wilayah tersebut dari dominasi Saddam Hussein dan mencegah adanya dominasi negara lain atas wilayah Timur Tengah.

Irak merupakan suatu negara di Timur Tengah. Keberadaannya secara geografis sangat dekat dengan Iran dan Saudi Arabia. Penempatan militer Amerika Serikat di Irak merupakan sebuah bentuk pengamanan terhadap adanya keinginan / usaha dari negara lain dalam menguasai Timur Tengah. Saat ini, negara Iran yang memiliki *nuclear power plant* dan beberapa fasilitas nuklir yang memiliki kemampuan dalam memproduksi misil nuklir. Negara Iran juga memiliki kendali atas 40 persen *global oil supply*, yang berarti Iran dapat mengendalikan harga minyak di dunia. Selain ancaman terhadap keamanan di Timur Tengah, Iran merupakan ancaman bagi dunia.²² Sebagai negara hegemoni yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur keamanan dunia, apabila ada gerakan dari negara lain yang ingin menguasai Timur Tengah harus dilakukan tindakan pencegahan, yang mana dengan cepat dapat dilawan oleh pasukan Amerika bila berada di wilayah Irak tersebut.

Penempatan militer merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh sebuah negara, dimana militer menunjukkan kekuatan (*power*) dari negara tersebut. Selain itu, keberadaan militer juga dapat memperluas pengaruh, baik itu dari segi yang mengancam dengan adanya perlawanan maupun sebagai kekuatan yang melindungi dari segala bentuk ancaman yang ada. Penempatan militer Amerika Serikat di Irak adalah untuk membangun pemerintahan Irak yang bisa membawa Irak menjadi negara yang mandiri, dan mampu menciptakan kondisi yang stabil bagi warganya.

Saat ini, AS bertanggung jawab dalam mengamankan rezim baru di Irak serta membantu proses rekonstruksi pemerintahan baru di Irak, yang mendukung terhadap usaha keamanan dunia dan keamanan regional Timur Tengah. Negara Irak yang terdiri dari berbagai kelompok yang saling berperang menjadikan

²² Geoff Metcalf, *Iran's Threat to the World*, 2005, <<http://archive.newsmax.com/archives/articles/2005/3/27/193827.shtml>>. (Diakses pada tanggal 21 Mei 2008, pada pukul 12:00 WIB).

pemerintahan Irak yang baru masih memerlukan perlindungan, terutama terhadap perlawanan dari kelompok-kelompok separatis di Irak sendiri.

Sekalipun konflik yang terjadi sebagian besar di wilayah Irak adalah konflik internal kelompok, namun menjadi bagian dari kegiatan pasukan AS di wilayah tersebut untuk mengamankan Irak, terutama serangan terhadap sumber minyak di Irak dan warga yang tidak bersenjata. Disamping itu pemerintah Irak masih memerlukan supportnya dalam rangka menjaga stabilitas keamanan regional. Hal ini juga merupakan salah satu langkah AS dalam menjalankan tanggung jawab stabilisasi di wilayah Irak tersebut.

Perlahan-lahan kelompok Irak mulai bisa menerima dan berpartisipasi dalam proses politik pemerintahan Irak yang baru, dan mulai melakukan perlawanan terhadap serangan yang berasal dari teroris. Berdasarkan laporan dari duta besar AS di Irak, terdapat kelompok yang telah membangun peran penting dalam meningkatkan hubungan antarkelompok.²³ Masih ada peluang untuk menjadikan Irak sebagai suatu negara yang stabil. Dalam hal ini diperlukan kesabaran dalam menekan kekerasan antarkelompok melalui usaha pendekatan politik maupun keamanan.

Irak begitu penting bagi Amerika Serikat, terutama dalam menjaga keamanan di kawasan Timur Tengah, sehingga membutuhkan proteksi dari Amerika Serikat. AS juga menginginkan agar tidak ada kekuatan lain yang mendominasi di wilayah Timur Tengah. Terutama terhadap wilayah Iran, yang melakukan tindakan mencegah terwujudnya stabilisasi di Irak dengan menyediakan perlindungan, pelatihan, senjata, dan membiayai perlawanan kaum ekstrimis di Irak terhadap pemerintahan Irak yang baru.²⁴

Harapan penempatan pasukan Amerika Serikat di Irak adalah ingin pemerintahan baru di Irak yang demokratis, mau mengamankan kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Mengingat bahwa potensial minyak Irak di Timur Tengah masih cukup besar dalam menentukan harga serta cadangan

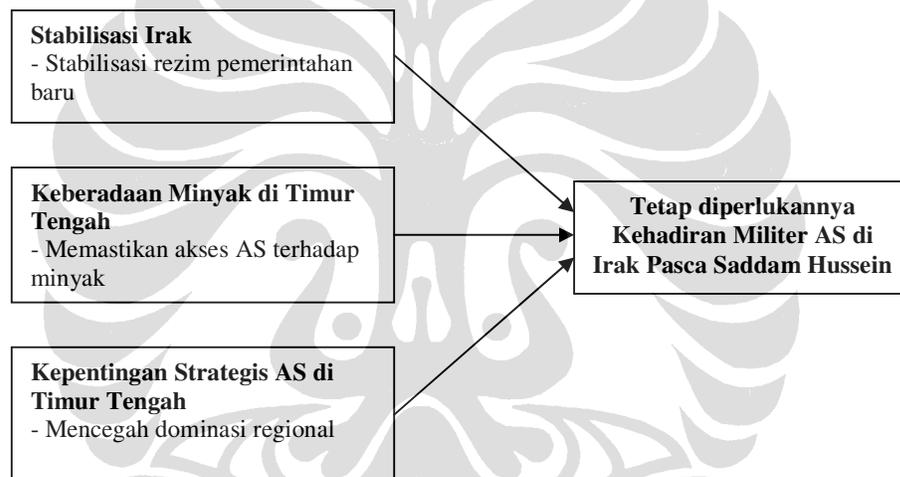
²³ Zalmay Khalilzad, *US Ambassador in Iraq, Iraq: The Current Situation and The Way Ahead. Statement to the Senate Foreign Relations Comitee*, 2006, <http://iraq.usembassy.gov/iraq/20060713_khalilzad_senate.html>. (Diakses pada tanggal 10 Mei 2008).

²⁴ *Ibid*

minyak di dunia.²⁵ Kedepannya, Amerika Serikat mau mengubah Irak yang saat ini kacau karena banyaknya pemberontakan antarkelompok dapat bersama-sama di bawah pemerintahan yang sejahtera, karena hasil dari penambangan minyak benar-benar dimanfaatkan maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Irak dan dunia.

Keberhasilan Amerika Serikat dalam membangun Irak yang demokratis diharapkan dapat mempengaruhi negara lain di sekitarnya, khususnya pada kawasan Timur Tengah akhirnya memiliki persepsi yang sejalan dengan Amerika Serikat, mengarah kepada perdamaian dunia.

1.7 Model Analisa



Gambar 1.1 Model Analisa Penelitian

1.8 Operasionalisasi Konsep

1. Keadaan Irak yang makin memburuk pasca runtuhnya rezim kekuasaan Saddam Hussein, AS merasa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan *Peacekeeping* di Irak. Yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas kawasan serta perlindungan dan pemantapan rezim baru yang telah dibentuk.

²⁵ 66% cadangan minyak dunia dipegang oleh Rezim Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Irak, Iran, UAE, Kuwait dan Libya. Disadur dari Institute for the Analysis of Global Security, 2002, *The Future of Oil*, <<http://www.iags.org/futureofoil.html>>. (diakses pada tanggal 20 Agustus 2008 jam 15:00 WIB)

2. Keberadaan minyak dunia yang sebagian besar di wilayah Timur Tengah, termasuk negara Irak menyebabkan AS tetap menempatkan militernya.
3. *Balance of Power* di wilayah Timur Tengah dapat terbentuk apabila Irak bersama-sama dengan militer AS menangkal adanya kekuatan-kekuatan baru yang ingin mengacaukan perdamaian dunia, terutama Iran yang memiliki nuklir di wilayahnya.

1.9 Asumsi dan Hipotesa

Asumsi:

1. Amerika Serikat mampu menggunakan militernya dalam membantu menjaga stabilitas di Irak karena banyak terjadinya pemberontakan antarkelompok dan pengaruh *Al Qaeda* yang masuk ke wilayah Irak.
2. Amerika Serikat sangat tergantung pada minyak dan negara Irak yang termasuk ke dalam wilayah Timur Tengah, memiliki cadangan minyak dunia yang cukup besar.
3. Amerika Serikat memerlukan kehadirannya di Irak sebagai *Balance of Power* di wilayah Timur Tengah, terutama dalam mengimbangi kekuatan negara Iran yang memiliki nuklir serta dominasi yang cukup kuat di Timur Tengah.

Hipotesa:

1. Kehadiran militer AS di Irak tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas Pemerintahan Irak pasca Saddam Hussein.
2. AS tetap memerlukan keberadaan militernya di Irak untuk memastikan akses terhadap potensi minyak yang cukup besar di kawasan tersebut tetap terbuka.
3. Kehadiran militer AS di Irak pasca Saddam Hussein memiliki makna yang penting dalam menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah, terutama dalam konteks meredam kekuatan / kekuasaan dominasi lainnya yang dapat timbul di wilayah tersebut.

1.10 Metode Penelitian

Dalam menyusun tesis mengenai Kehadiran Pasukan Militer Amerika Serikat di Irak Pasca Saddam Hussein periode 2003 – 2006, penulis menggunakan pendekatan triangulasi, dimana menggunakan metode kuantitatif untuk mengetes kebenaran dari hasil temuan riset yang kualitatif, dan juga sebaliknya.²⁶ Pada intinya, metode triangulasi mengacu kepada kombinasi penggunaan beberapa metode dalam penelitian, pengambilan data, dan metodologinya.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data menggunakan metode kualitatif serta melakukan pembahasan dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kualitatif yang dimaksud disini adalah melakukan analisa data berdasarkan pada sumber berita serta kejadian yang terjadi di wilayah Irak oleh Amerika Serikat. Analisa tersebut akan bersifat deskriptif dan explanatif, berdasarkan pada hasil penemuan data, diikuti dengan persepsi atau pandangan ke depan mengenai bagaimana kenyataan yang terjadi dari data yang terkumpul, menyarankan atau memberikan solusi terbaik yang dapat menjadikan keuntungan bagi banyak pihak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup baik data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari dokumen resmi maupun pernyataan dari pemerintah Amerika Serikat dan juga badan organisasi dunia. Pandangan serta pernyataan dunia ini perlu sebagai titik pandang suatu negara yang diwakili oleh pemerintahnya, maupun oleh organisasi internasional terhadap suatu masalah dunia, dalam hal ini khususnya masalah mengenai Perang Irak yang terjadi secara berkepanjangan ini.

Sementara untuk data sekunder, berasal dari studi dokumen dan literatur. Studi dokumen adalah studi yang dilakukan atas dokumen-dokumen kebijakan negara yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁷ Sedangkan studi literatur adalah studi yang menggali kembali dasar-dasar ilmiah dari tema yang hendak diangkat melalui peninjauan karya-karya ilmiah bertema serupa yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain.²⁸ Penulis memperoleh data-data tersebut

²⁶ Alan Bryman, *Social Research Methods*, Oxford: Oxford University Press, 2004, Hal.455

²⁷ W.Laurence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Third Edition, Boston: Allyn and Bacon, 1997, Hal.95

²⁸ *Ibid.* p89

melalui jurnal online dan koran-koran seperti *New York Times*, yang sebagian besar diantaranya diperoleh melalui jurnal online *ProQuest*.²⁹ Disamping itu, penulis juga mendapatkan sumber-sumber data cetak melalui koleksi literatur mengenai Hubungan Internasional serta peristiwa-peristiwa dunia, khususnya dalam konteks Perang di Irak.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana objek serta permasalahan penelitian dideskripsikan pada awal penulisan, yang kemudian akan dianalisa lebih dalam sehingga dapat menghasilkan suatu solusi yang terbaik bagi semua pihak. Khususnya dalam peristiwa Perang di Irak pada tahun 2003, dimana Amerika Serikat mulai menempatkan pasukannya di wilayah Irak.

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian *case study* atau studi kasus, karena penelitian ini mengobservasi secara mendalam suatu peristiwa/ kejadian faktual di dunia internasional, terutama peristiwa Perang di Irak (dalam periode tahun 2003 hingga tahun 2006). Pengambilan periode tersebut adalah karena di tahun 2003 yang merupakan awal penyerangan ke-dua Amerika Serikat kepada Negara Irak dibawah pemerintahan Saddam Hussein, setelah sebelumnya terjadi penyerangan di wilayah Kuwait yang diduduki olehnya pada waktu itu.

Dalam hal ini, AS ingin menghancurkan rezim Saddam Hussein yang membahayakan keamanan dunia pada saat itu. Setelah berhasil menghancurkannya, AS masih dibutuhkan untuk tetap tinggal disana. Kekosongan kekuasaan di Irak serta banyaknya pertentangan antarkelompok menjadikan proses *rebuilding* di wilayah tersebut menjadi sulit.

Dari pasca rezim Saddam Hussein, peran penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak adalah untuk menjaga stabilitas wilayah Irak yang masih rawan akan pemberontakan serta perang antarkelompok terhadap pemerintahan yang telah dibentuk. Perlunya keberadaan pasukan militer Amerika Serikat disini dalam menciptakan kondisi negara Irak yang stabil dan makna pentingnya Irak bagi Amerika Serikat dalam mendukung perang terhadap terorisme di wilayah

²⁹ *Proquest Online Journal Search*, 2008, <<http://www.proquest.com/pqdweb/>>.

Timur Tengah, menentukan citra Amerika Serikat di wilayah kawasan Timur Tengah khususnya, dan dunia internasional pada umumnya.

1.11 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini mencakup pembahasan mengenai Kebijakan Militer AS dalam penempatan pasukannya di wilayah Irak pasca rezim Saddam Hussein. Secara lebih mendalam, dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Mengulas tentang latar belakang masalah tesis, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesa dan asumsi, model analisa, operasionalisasi konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang secara keseluruhan membahas tentang masih diperlukannya penempatan pasukan AS di Irak Pasca Saddam Hussein.

BAB 2 KEHADIRAN MILITER AS DI IRAK

Menggambarkan tentang kehadiran militer AS di Irak pasca rezim pemerintahan Saddam. Keberadaan militer AS di Irak ditempatkan di hampir seluruh titik wilayah Irak yang masih memerlukan pengamanan baik itu di kilang minyak maupun daerah pusat pemerintahan. Kondisi dan situasi Irak pasca Saddam masih memerlukan militer AS untuk mempertahankan rezim dan stabilisasi.

BAB 3 STABILISASI REZIM BARU DI IRAK

Pembentukan rezim baru Irak yang masih menghadapi banyaknya ancaman dari para pemberontak, dan belum memiliki kekuatan yang dalam mengamankan dan mengendalikan situasi aman, masih memerlukan bantuan dari militer AS. Timbulnya banyak korban baik dari internal Irak, maupun pasukan AS semakin menunjukkan bahwa rezim baru di Irak belum stabil dan masih memerlukan bantuan pasukan AS untuk menciptakan kondisi yang stabil.

BAB 4 KEBERADAAN MINYAK DI TIMUR TENGAH

Mengambarkan mengenai kepentingan AS terhadap keberadaan minyak dunia yang cukup besar di kawasan Timur Tengah, termasuk diantaranya di negara Irak. Hal ini menyebabkan AS perlu menempatkan militernya di kawasan tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan akses terhadap kebutuhan dan ketersediaan minyak di Timur Tengah tetap terbuka, dan mengamankan jalur serta penambangan minyak AS di Irak.

BAB 5 KEPENTINGAN STRATEGIS AS DI TIMUR TENGAH

Mengulas tentang peranan militer AS di Irak dalam menjaga *balance of power* di wilayah Timur Tengah. Amerika Serikat berusaha menjaga keseimbangan/ stabilisasi kawasan. Disamping itu, penempatan militer AS di Irak mencegah muncul kekuatan baru yang dominan di regional tersebut yang bisa merusak stabilitas kawasan.

BAB 6 KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari studi kasus masih diperlukannya pasukan militer AS di Irak pasca rezim Saddam Hussein dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan AS masih menempatkan keberadaan militernya di wilayah Irak.